

## **MEMBANGUN SISTEM SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK ACEH MASA DEPAN**

Oleh:

Erman Anom

Dosen Fikom – UIEU

erman.anom@indonusa.ac.id

### **ABSTRAK**

Keseimbangan antara penataan struktur, proses, dan budaya politik merupakan salah satu demokratisnya sistem sosial budaya dan politik Aceh Indonesia. Sufrastuktur dan Infrastruktur dalam sistem sosial budaya dan politik Aceh Indonesia harus mempunyai keseimbangan, kalau tidak mempunyai keseimbangan, demokrasi Aceh Indonesia jalan ditempat, tidak berjalan, dan mati suri. Format sosial budaya dan politik masa depan Aceh Indonesia yang ideal harus mengacu pada pengembangan kehidupan masyarakat Aceh berbangsa dan bernegara dengan tidak mengabaikan dimensi religius, nilai-nilai budaya masyarakat Aceh, solidaritas, kritis, dan kualitas.

### **Kata Kunci:**

Sistem sosial budaya, masyarakat Aceh, politik masa depan

### **Pendahuluan**

Terkesima dengan rangkaian berita Kompas, 16 September 2005 yang cukup holistik. Betapa tidak, Pemerintah akan membagikan Rp. 5.000,-/hari sebagai jaminan hidup kepada anggota GAM sebagai dana integrasi selama 3 – 6 bulan . Pemerintah akan membagikan Rp. 100.000.-/bulan kepada 15.5 juta penduduk miskin selama satu tahun.

Saya hanya bisa membayangkan andaikata saya warga negara tetangga, mendengar kebijakan pemerintah Indonesia yang demikian. Pemerintah Indonesia terkesan sangat kaya dengan penuh perhatian terhadap rakyatnya, pemberi, pemaaf dan pengayom. Indah lah negara yang demikian! Bukan bermaksud membandingkan dengan negara lain, kaya tidak atau langkah

mengambil kebijakan seperti pemerintah Indonesia. Di balik itu semua, bukankah Indonesia mengalami krisis keuangan dan utang yang besar? Ada apa sebenarnya ?

Pengamat pernah memberi istilah, Pemerintah Indonesia sekarang katanya tidak punya visi ke depan, tidak memiliki program kerja yang jelas. Pemerintah mengambil kebijakan terkesan yang populis daripada yang substantif. Pemerintah mengambil kebijakan behitung keuntungan ekonomi daripada keuntungan martabat. Pemerintah mengambil kebijakan terkesan mengutamakan kepentingan negara lain daripada warga sendiri. Pemerintah mengambil kebijakan terkesan sebagai pemadam kebakaran dimana setelah terjadi masalah baru bertindak.

Pemberian istilah tersebut, merajut istilah baru pemerintah melakukan money politik. Dalam mengatasi persoalan bangsa, pemerintah sekarang sering menyuguhkan uang kepada rakyat. Pemberian uang kompensasi, uang integrasi, dan pemberian uang jaminan pengaman sosial. Masalah pemberian uang akan menyelesaikan persoalan sementara selama uang masih ada. Masalah akan muncul kembali bila uang telah habis. Lebih berbahaya lagi bila pemberian uang menciptakan ketergantungan dan menjadi tuntutan bila menemui persoalan. Ujung-ujungnya pemberian uang juga dapat melemahkan kreativitas.

Alamat pemberian uang subsidi perlu memang diteliti, tetapi lebih baik bila anggota dewan yang menatanya dan menyelesaikannya.

Kembali kepada permasalahan yaitu membangun sistem sosial budaya dan politik Aceh masa depan, ketidakseimbangan antara penataan struktur, proses, dan budaya politik merupakan salah satu sebab belum demokratisnya sistem sosial budaya dan politik Aceh Indonesia. Selain itu, pembangunan sistem sosial budaya dan politik Aceh Indonesia yang telah dilaksanakan selama ini masih belum mampu memberikan peran yang cukup besar kepada infrastruktur politik.

Dominannya peran sufrastruktur terhadap infrastruktur politik tersebut memunculkan kecenderungan perilaku politik yang berdasarkan patron client. Padahal nilai-nilai luhur yang terdapat dalam masyarakat Aceh Indonesia menolak paham yang sempit tersebut.

Kecenderungan perilaku dan budaya yang demikian selain tidak sesuai dengan tuntutan masa depan, juga tidak sesuai dengan budaya, falsafah, dan nilai luhur masyarakat Aceh Indonesia.

Dengan demikian perlu dipikirkan dan dikembangkan suatu format sistem sosial budaya dan politik yang sesuai dengan tuntutan masa depan, mampu menjawab keperluan zaman, dan mampu mengembangkan nilai luhur budaya bangsa Aceh Indonesia.

### **Metodologi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisa dokumen dan wawancara. Metode kualitatif ini digunakan kerana beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara pengkaji dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

### **Kerangka Isue**

Sebelum berbicara tentang format sistem sosial budaya dan politik masa depan, kita perlu melihat format sistem sosial budaya dan politik selama ini dengan mengajukan pertanyaan:

Adakah masalah substansial yang krusial sehingga format yang tampak dianggap kurang optimal dalam manampung akselerasi gerak partisipasi masyarakat karena peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dan tuntutan self government.

Ada beberapa isu pokok yang perlu dicermati, yaitu:

1. Hubungan antara institusi politik (legislatif, eksekutif, yudikatif) menumbuhkan ketidaktaatan asas pada pola kerja hubungan antar institusi politik Aceh Indonesia.
2. Adanya arus baru yang memerlukan pengcoveran sebagai ekspresi interaksi antara masyarakat (informal politik) dengan lembaga pemerintah (formal politik).
3. Bagaimana pembentukan kultur politik terbangun melalui optimalnya fungsi struktur politik, tidak sebaliknya struktur bekerja mengikuti kultur.
4. Pengembangan dan pengayaan variasi peran masyarakat (individu, kelompok masyarakat, organisasi massa) dalam proses penyelesaian problem dan antisipasi terhadap tantangan mendatang harus mendapatkan prioritas pengikhtiarannya.
5. Bahwa pembakuan partai kedalam 2 barisan (yang memerintah dan yang menjadi oposisi) / barisan partai lokal dan barisan partai nasional menciptakan kestabilan keamanan dan politik.
6. Bahwa pembakuan partai kedalam 2 barisan orsospol/barisan partai lokal dan barisan partai nasional secara psikologis mendatangkan beberapa

konstrain, yaitu adanya mispersepsi tentang kedua barisan orsospol, terlebih pada aspek positioning orsospol dalam politik.

### **Pengembangan Kehidupan bermasyarakat dan Berbangsa**

Berdasarkan isue tersebut diatas yang dipadukan dengan kondisi objektif masyarakat, maka Aceh Indonesia dihadapkan pada problematika dalam membangun masyarakat kebangsaan Aceh Indonesia. Bangunan masyarakat kebangsaan termaksud adalah sebagai proses pemaknaan dan pemuatan nilai luhur masyarakat sebagai ideologi bangsa Aceh Indonesia. Artinya, dinamika bangsa sebagai unsur dinamik senantiasa menuntut terbukanya kesempatan-kesempatan baru bagi penguatan basis kemasyarakatan. Dengan kata lain, terjadinya proses reduksi bagi perbedaan yang destruktif sekaligus terjadinya proses induksi perbedaan yang konstruktif.

Oleh karena itu, dimensi pokok yang harus memaknai pengembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Aceh Indonesia adalah:

1. Dimensi Religius. Proses penguatan dimensi ini dimaksudkan sebagai pemberian peluang bagi individu/masyarakat untuk mengembangkan dorongan keberagamaan bagi terwujudnya masyarakat yang etis dan bermoral.
2. Dimensi Solidaritas. Terlalu banyak faktor pemisah, baik geografis, etnis (berbagai suku bangsa di Aceh), maupun tradisi fanatik suku yang terbangun membutuhkan suatu instrumen bagi berkembangnya rasa saling peduli, kepekaan, dan mau tahu. Migrasi secara etnis maupun geografis merupakan program prioritas dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan Aceh Indonesia.
3. Dimensi Kritis. Pengembangan masyarakat sebagai suatu keluarga seharusnya tidak menghilangkan

sikap kritis individu sebagai upaya maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Sikap kritis ini memiliki tiga muatan, yaitu kepekaan, keberanian, dan ketulusan bagi akselerasi pencapaian tujuan masyarakat Aceh Indonesia.

4. Dimensi Kualitas. Sebagai masyarakat yang memiliki berbagai suku bangsa dan pengkondisian kompetitif mengacu pada suatu acuan yaitu kualitas. Dengan acuan ini, maka keberlindungan dengan kemasam yang menghilangkan kualitas seperti koneksitas, primordialisme sempit, kolusi, korupsi, nepotisme, fanatik kesukuan dan lain-lain dapat terkuat dan menjadi sesuatu yang kedaluarsa.

### **Format Sistem Sosial Budaya dan Politik Masa Depan Aceh Indonesia**

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk tercapainya format kehidupan sosial budaya dan politik masa hadapan, yaitu mewujudkan sistem sosial budaya, dan politik sebagai berikut: Pengurusan atau pemerintahan Gampong (desa), Mukim, Daerah, Nanggro. Pembaharuan ketatanegaraan Aceh sangat diperlukan sebagai dengan semangat dan tujuan *self government* yang dimiliki.

### **Pengurusan atau pemerintahan Gampong (desa).**

Pengurusan dan pemerintahan Gampong terdiri atas tiga unsur yaitu: Keuchik (kepala desa) dibantu oleh seorang atau beberapa orang wakil (wakil), Teungku (imam), Ureueng tuha. Keuchik ialah pemimpin atau bapak gampong, yang menerima wewenangnya dari masyarakat gampong. Jabatan ini sama halnya dengan seluruh jabatan di Aceh Indonesia adalah jabatan yang dipilih dalam muafakat oleh masyarakat gampong. Keuchik pada hakikinya bahwa dialah yang membela kepen-

tingan dan keinginan warga gampongnya, baik berhadapan dengan gampong-gampong lainnya, ataupun terhadap tuntutan-tuntutan yang berlebih-lebihan dari warga gampong itu sendiri. Orang Aceh sering mangutip-utip dalam rapat-rapat: "keuchik" eumbah, teungku ma" yaitu kechik ibarat bapak, teungku ibarat ibu.

Seluruh penduduk gampong yang cinta damai merasa yakin bahwa mutlak dibutuhkan seseorang yang berbicara dan berunding atas nama seluruh warga; apalagi seperti beraneka urusan keluarga (perkawinan, perceraian, pengasuhan anak yatim piatu, soal pindah rumah). Sumber pendapatan keuchik. Keuchik adalah jabatan kehormatan, dan sebenarnya pendapatan yang akan diperolehnya menurut adat sungguh tak seberapa. Pendapatan itu terbatas hanya kepada apa yang disebut "ha' katib" atau "ha' cupeng", yaitu imbalan untuk bantuan yang diperlukan dari keuchik itu untuk pernikahan warga gampongnya dan urusan-urusan lain yang berkaitan dengan urusan gampong.

Jabatan keuchik di Aceh, sebagai bapak warga gampongnya, dihargai tinggi, terutama karena sifat kehormatannya, namun juga karena keuntungan nyata yang terlekat pada jabatan ini. Sebagai bawahannya, yang secara nyata lebih banyak membantu keuchik itu dibandingkan warga gampong lainnya, ialah wakilnya yaitu wakil atau kuasanya. Setiap keuchik paling tidak dibantu oleh seorang waki.

Wewenang Keuchik. Kewajiban keuchik dengan bantuan punggawa (staf) gampong lainnya yang setiap waktu dapat dipanggil untuk diberi tugas, untuk memelihara tertib-aman, serta juga mengusahakan kesejahteraan penduduk sepenuh kemampuannya. Berkenaan dengan kesejahteraan itu, jumlah cacah jiwa merupakan faktor penting. Kerana itu dianggap wajar bahwa seorang bapak dengan ketat mengawasi gerakan keluar masuk warga

gampongnya, jika hal itu dapat berakibat mengurangi jumlah penduduknya.

Teungku. Teungku adalah "ibu" warga gampongnya. Teungku adalah gelar yang diberikan umumnya di Aceh kepada orang yang mengemban jabatan yang berkaitan agama atau yang berbeda dari penduduk awam umumnya kerana lebih sempurna pengetahuan agamanya atau pun lebih khusyuk menunaikan ibadah. Sebagai teungku meunasah selayaknya bagi "ibu gampong" itu menjadi kewajiban menjamin agar "gedung meunasah" (wilayah kekuasaan) itu sesuai keadaannya dengan tujuan keagamaannya. Namun hal ini jarang terjadi, dan dalam keadaan langka terjadinya itu; ini lebih banyak diakibatkan oleh salehnya bapak keuchik daripada ketekunan kerja si ibu teungku itu. Dalam pemerinthan gampong di Aceh teungku tugasnya mengurus urusan keagamaan warga gampong. Sedangkan sumber penghasilan teungku dari Pitrah (fitrah), jakeuet (zakat), Imbalan uang untuk pengurusan pernikahan, ha' teuleukin (uang talkin), persengketaan warga gampongnya.

Ureung Tuha (tokoh masyarakat). Kaum ureueng tuha, yang tepat setara dengan yang disebut orang tua di kalangan kita, adalah kaum yang berpengalaman, kebijaksanaan, bersopan-santun dan cukup berpengetahuan tentang hal adat dalam suatu gampong. Jumlah anggota dewan ureueng tuha itu tidaklah tentu; dan para anggotanya bukanlah diangkat tetapi dipilih atas kesepakatan bersama. Keanggotaan ureueng tuha kerana diakui kebijakannya, pengalamannya atau pengetahuannya tentang adad, dengan sendirinya akan diakui orang sebagai warga ureueng tuha itu dan pendapatnya akan diindahkan pada dalam rapat mufakat.

Orang Aceh masyur sebagai kaum pengemar apa yang disebut mufakat. Persoalan-persoalan yang paling sepele pun dijadikan alasan untuk

pertukaran pendapat yang ramai-ramai. Para kepala adat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut dengan daerahnya serta warga daerahnya harus ada dan hadir pula beberapa orang tokoh yang dapat dianggap sebagai wakil dari golongan atau daerah bersangkutan, karena kalau lalai bila lalai berbincang-bincang dengan wakil itu, keputusan mufakat tidak sah.

### Mukim dan Adminitrasi Pemerintahannya.

Di antara para pejabat gampong dengan penguasa daerah terdapat para imeum (imam), yang mengepalai daerah mukim. Wilayah Aceh dibagi menjadi beberapa distrik yang diberi sebutan mukim dengan jabatan imeum sebagai kepala distrik. Lembaga ini timbul di Aceh kerana pengaruh kaum ulama dan tokoh-tokoh keagamaan.

Tujuan asli pembentukan mukim. Tujuan semula dapat dilihat dari penggunaan istilah mukim itu. Mukim ialah suatu istilah Arab, yang makna sebenarnya ialah penduduk suatu tempat. Hukum Islam, menurut mazhab Syafii yang unggul di tanah Aceh, menentukan bahwa untuk menegakkan jemaat hari jumat mutlak diperlukan kehadiran paling sedikit 40 orang mukim yang termasuk golongan penduduk bebas yang telah dewasa.

Di Aceh, mukim mempunyai peranan untuk mengkoordinirkan gampong-gampong, supaya gampong-gampong berjalan sesuai dengan tatanan yang telah disepakati oleh musyawarah gampong, dalam peranannya mukim berlandaskan kepada nilai-nilai Islam.

Imeum mukim menjadi tokoh yang dapat diteladani oleh pemerintah gampong-gampong, untuk itu pengetahuan agama dan kepemimpinan sangat menjadi yang utama yang harus dimiliki oleh imeum mukim, kerana peranan yang dimainkan oleh imeum mukim selain memimpin pemerintahan dan juga menjadi pemimpin agama. Imeum

dipilih oleh musyawarah masyarakat semukim itu yang anggota-anggota dari pengetua2 gampong (keuchi'), cerdik pandai, dan ureng tuha.

### Daerah dan administrasi pemerintahannya.

Para pengetua daerah adalah yang dipertuan di negeri masing-masing, dan merupakan kepala daerah *par excellence* (cerdik pandai), mereka mempunyai kekuasaan autonom. Dalam menjalankan peran dan tugas pemerintahan pengetua daerah di bantu oleh yang mengurus administrasi pemerintah. Pengetuan daerah dipilih langsung oleh masyarakat lewat pemilu yang diadakan.

### Nanggro dan administrasi pemerintahannya.

Kepala pemerintahan nanggro disebut wali nanggro yang berperan dan mempunyai tugas sebagai koordinator pengetua-pengetua daerah. Wali Nanggro dipilih oleh pengetua-pengetua daerah dan anggota parlimen daerah dan para utusan cerdik pandai dari golongan agama dan cerdik pandai dari golongan non agama dalam sebuah musyawarah. Dalam menjalankan kepemimpinannya wali nanggro dibantu oleh kepala administrasi pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu.

Struktur Pemerintahan Daerah Aceh Masa Depan



## **Penutup**

Pembangunan adalah tuntutan perubahan. Perubahan dalam kerangka kemajuan dan kehidupan yang lebih baik serta perubahan yang direncanakan. Wujud dari sebuah perubahan dapat berupa reformasi/pembaharuan dan restrukturisasi. Pembaharuan harus konsisten dan merupakan bagian dari implementasi dan kesinambungan dari konsep, kebijakan, dan strategi pembangunan bangsa.

Format sosial budaya dan politik masa depan Aceh Indonesia yang ideal harus mengacu pada pengembangan kehidupan masyarakat Aceh berbangsa dan bernegara dengan tidak mengabaikan dimensi religius, nilai-nilai budaya masyarakat Aceh, solidaritas, kritis, dan kualitas.

## **Daftar Pustaka**

- Miriam Budirdjo., "Dasar-dasar Ilmu Politik", Gramedia, Jakarta, 2001.
- Feith, Herbert., "*The decline of constitutional democracy in Indonesia*", Cornell University Press, Itchaca, 1962.
- Snouck Hurgronje., "Aceh di mata kolonialis" Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.
- Alfian., "Pemikiran dan perubahan politik Indonesia", Gramedia, Jakarta, 1985.